

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Saat investor akan menanamkan modalnya pada suatu negara, maka investor tersebut akan mempelajari laporan keuangan perusahaan yang akan diberikan dana. Untuk dapat memahami laporan keuangan tersebut, maka investor juga harus memahami standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara tersebut. Banyaknya standar akuntansi keuangan yang berlaku di dunia, menyebabkan investor kesulitan mempelajari standar akuntansi keuangan masing-masing negara sehingga pada awal tahun 2000-an muncullah wacana untuk menyamakan standar akuntansi keuangan yang kemudian lebih dikenal dengan konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap sejak 2008 hingga 2011 dengan berbagai tahap yang terdiri dari proses pengadopsian IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku pada tahun 2010, persiapan akhir infrastruktur yang dilakukan dan pengimplementasian secara bertahap pada tahun 2011 dan pengimplementasian secara bertahap beserta pengevaluasian dampak penerapan IFRS secara komprehensif pada tahun 2012. IAI sebagai pihak yang memiliki wewenang mengenai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia mewajibkan perusahaan go

*public* dan multinasional yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan sejak standar tersebut berlaku secara efektif, yaitu 1 Januari 2012 (Husin, 2008).

Pada standar akuntansi berbasis IFRS ini, terdapat dua pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Pengungkapan yang bersifat wajib meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang wajib dilaporkan perusahaan kepada publik menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan. Tanpa peraturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan sehingga diperlukan peraturan mengenai hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor (Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko, 2012).

Adina dan Ion (2008) berpendapat bahwa *mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang. *Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku.

Informasi yang disajikan secara tidak benar dapat menyebabkan investor mengambil keputusan yang salah seperti yang terjadi pada kasus PT. Kimia Farma dan Bank Century. Yang terjadi pada PT. Kimia Farma adalah kesalahan penyajian yang cukup mendasar yaitu penggelembungan laba yang dihasilkan pada akhir periode Desember 2001 dan penjualan. Keuntungan yang seharusnya diterima pada tahun tersebut sebesar Rp 99,56 miliar sedangkan yang disajikan dalam laporan keuangan lebih tinggi sebesar Rp 32,6 miliar atau Rp 132 miliar sedangkan kesalahan penyajian yang terkait dengan penjualan dilakukan dengan menggandakan pencatatan atas penjualan. Selain PT. Kimia Farma, Bank Century juga merupakan salah satu perusahaan yang melakukan manipulasi keuangan. Manipulasi tersebut dikuatkan dengan penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa posisi rasio kecukupan modal Bank Century per Oktober 2008 adalah -3,5 persen sedangkan angka yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan masih di posisi 2,5 persen.

Penerapan standar akuntansi saja belum cukup untuk menghambat manipulasi keuangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga diperlukan *corporate governance* yang telah dikenal sebagai sistem yang mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Masa krisis berkepanjangan yang dialami Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan isu mengenai *corporate governance* mulai diperhatikan di Indonesia. Lemahnya penerapan *corporate governance* oleh perusahaan di Indonesia menyebabkan proses perbaikan *pasca*

krisis menjadi sangat lama sehingga baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap penerapan *corporate governance* (Wardhani, 2007). Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan jumlah anggota komite audit independen. Alasan pemilihan kelima indikator *corporate governance* tersebut adalah karena dewan direksi merupakan ujung tombak penerapan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib suatu perusahaan dengan pengawasan dari komisaris independen dan anggota komite audit independen. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang ditetapkan oleh regulator bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik saham. pemilik saham yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah manajemen dan pihak institusi. Indikator tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 10, PSAK 13, PSAK 14, PSAK 16, PSAK 23, PSAK 26, PSAK 30, dan PSAK 56. PSAK-PSAK tersebut digunakan dalam penelitian ini karena psak-psak tersebut sudah konvergen dengan IFRS dan mencakup aktivitas-aktivitas yang paling sering dilakukan di perusahaan manufaktur.

Penelitian ini dilatarbelakangi motivasi bahwa penelitian mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS tergolong isu yang masih jarang dibahas di Indonesia, namun sudah sering dilakukan penelitian tersebut di luar negeri. Salah satunya adalah penelitian dari Ettredge, Johnstone, Stone, & Wang (2010) yang

membahas mengenai dampak ukuran perusahaan, kualitas *corporate governance*, dan kabar buruk pada kepatuhan pengungkapan. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa dewan direksi, komite audit, dan kekuatan kontrol internal memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pengungkapan. Peneliti menemukan bahwa dewan dan komite audit yang lebih aktif akan mendorong kepatuhan pengungkapan yang lebih sering. Selain itu, peneliti juga menemukan hubungan positif antara kepatuhan pengungkapan dengan jumlah ahli keuangan dalam komite audit.

Penelitian dengan pembahasan serupa di Indonesia dilakukan oleh Nafisah (2011), Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012), Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012), dan Pitasari & Septiani (2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan menjadi semakin efektif dengan semakin banyak proporsi anggota komisaris independen dalam suatu perusahaan sehingga pihak independen yang menuntut pelaporan keuangan perusahaan yang transparan semakin banyak menyebabkan terdapat pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS (Nasution & Setiawan, 2007). Variabel lainnya dalam penelitian seperti jumlah anggota dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris wanita, proporsi komisaris wanita,

profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Menurut Beasley (1996), adanya komisaris yang memiliki saham perusahaan dapat meningkatkan kemampuan komisaris untuk memantau manajemen puncak secara efektif sehingga dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dikarenakan adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar (Utami, Suhardjanto, & Hartoko, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan Nafisah (2011), struktur *corporate governance* yang mempunyai pengaruh positif pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit sedangkan proporsi anggota komite audit independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur karena pengungkapan yang lebih luas dan lengkap disajikan oleh perusahaan manufaktur (Cooke, 1992). Selain itu, cakupan investor yang dimiliki

perusahaan manufaktur lebih luas daripada sektor industri lainnya (Renders & Gaeremynck, 2005) karena dalam kegiatannya mengandalkan modal dari investor. Dengan adanya fakta diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul adalah “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
2. Apakah proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
3. Apakah proporsi anggota komite audit independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
4. Apakah kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
5. Apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?
6. Apakah likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?

7. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiris pengaruh jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
2. Menguji secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
3. Menguji secara empiris pengaruh proporsi anggota komite audit independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
4. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
5. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
6. Menguji secara empiris pengaruh likuiditas terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
7. Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :



1. Bagi perusahaan jasa yang telah *go public*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *corporate governance* kaitannya dengan tingkat kepatuhan pengungkapan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan didalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bagian, yang dimana meliputi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi telaah teoritis yang membahas teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran dari penelitian, dan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, batasan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data serta pembahasannya.

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup ini akan diuraikan mengenai simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian sebagai bahan masukan.